

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah masalah serius yang dihadapi oleh negara berkembang maupun di negara maju. Negara berkembang atau negara maju tidak bisa benar-benar lepas dari kemiskinan. Perbedaan kemiskinan di negara hanya terletak pada angka dan solusi dari tingkat kesulitan dalam melakukan pengentasan kemiskinan. Kemiskinan yang dihadapi penduduk telah menjadi perhatian dunia dan menjadi isu sentral dalam *Millenium Developptmen Goal* (MDGs). Negara peserta konfrensi dituntut mengurangi jumlah penduduk yang miskin dan mengatasi kekurangan pangan hingga 50 persen pada tahun 2015 sehingga tujuan pembangunan nasional dapat tercapai (Iswara & Indrajaya, 2014). Kemiskinan bukan hanya diukur dari hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan yang rendah. Kemiskinan meliputi tentang tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan tingkat ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidup sendiri. Kemiskinan ditandai dengan rendahnya pendapatan per kapita dan lebarnya kesenjangan distribusi pendapatan (Billady & Marhaeni, 2019)

Islam sebagai agama penyempurna memahami bahwa kemiskinan merupakan sebuah persoalan yang harus dipecahkan oleh kaum muslim. Untuk memecahkannya maka Nabi Muhammad SAW memberikan pada umatnya tentang bagaimana definsi miskin dalam pandangan Islam Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW di dalam Hadist Rasul menjelaskan definisi miskin dalam pandangan Islam, seperti pada hadist berikut:

لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ ، وَلَا اللَّفْمَةُ وَلَا اللَّفْمَتَانِ ، إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ

Artinya: —Orang yang miskin bukanlah orang yang merasa telah cukup dengan satu atau dua buah kurma, atau sesuap atau dua suap makanan. Tetapi orang miskin adalah orang yang tidak meminta-minta dan menunjukkan kemiskinannya kepada orang lain. Jika kalian mau bacalah

firman Allah: —Mereka tidak meminta-minta kepada orang lain.‖ (H. R. Al-Bukhari) (Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari: 205)

Indonesia merupakan negara dengan ribuan pulau dan berbagai macam perbedaan karakteristik wilayah. Perbedaan karakteristik wilayah mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pola pembangunan ekonomi, mengakibatkan pola pembangunan di Indonesia tidak seragam. Ketidakteragaman pola pembangunan ekonomi di Indonesia berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh. Perbedaan tersebut mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Ada wilayah yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi pesat, sementara wilayah lain mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lambat. Perbedaan pertumbuhan ekonomi tersebut mengakibatkan tingginya jumlah kemiskinan di Indonesia. Berikut tabel jumlah kemiskinan di Indonesia:

Tabel 1. 1
Jumlah Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2010-2019

Sumber: informasi	Tahun	Jumlah (Juta Jiwa)	Presentase	BPS, data dan kemiskinan
	2010	31.02	-	
	2011	30.02	12,49	
	2012	28.59	11,66	
	2013	28.55	11,47	
	2014	27.72	10,96	Tabel
1.1	2015	28.51	11,33	menunjukkan
bahwa	2016	27.76	10,7	jumlah
penduduk	2017	26.58	10,12	di
Indonesia	2018	25.67	9,66	miskin
	2019	25.14	9,41	pada tahun

2010-2019 mengalami penurunan. Table data di atas menunjukkan bahwa jumlah kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2010 dengan total 31.02 juta jiwa. Jumlah kemiskinan mengalami penurunan setiap tahun hingga pada tahun 2019. Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan tertinggi dengan jumlah 25.14 juta jiwa.

Maret 2019 jumlah masyarakat miskin di Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,53 juta jiwa terhadap jumlah masyarakat miskin pada 2018 dan menurun 0,80 juta jiwa terhadap Maret 2018. Presentase penduduk miskin turun sebanyak 0,25 persen poin dari 9,41 persen jika dibandingkan pada 2018 yaitu 9,66 persen. (beritagar, 2019).

Penurunan jumlah kemiskinan di Indonesia menunjukkan bahwa program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan (Iswara & Indrajaya, 2014). Data tabel di atas merupakan jumlah penurunan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Jumlah kemiskinan dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk yang miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Provinsi Bali yang terkenal dengan destinasi pariwisata tidak luput dari permasalahan kemiskinan. Penelitian ini akan membahas tentang kemiskinan yang terdapat di Provinsi Bali. Penelitian ini akan mengambil kasus di 9 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali. Peneliti memilih provinsi Bali sebagai lokasi penelitian karena Bali merupakan wilayah yang mempunyai karakteristik wilayah berbeda dari pada wilayah lain di Indonesia. Mayoritas sektor utama wilayah lain adalah pertanian. Sementara di Bali, sumber ekonomi utama pendapatan daerah di provinsi Bali adalah sektor pariwisata, seharusnya peningkatan pendapatan daerah membuat penduduk mencukupi kebutuhan hidupnya. namun dalam praktiknya kemiskinan di Bali masih tinggi. Padahal seharusnya dengan perkembangan pariwisata yang pesat di Bali, seharusnya pemerintah daerah dapat melakukan langkah-langkah strategis yang mampu memaksimalkan keunggulan sektor pariwisata di Bali.

Pesatnya pariwisata di Bali tidak menjamin bahwa wilayah tersebut dapat mengangkat ekonomi seluruh masyarakat. Hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Bali. Fenomena kemiskinan di Bali masih tinggi. Hal demikian dapat dibuktikan dengan tabel berikut.

Tabel 1. 2
Jumlah Kemiskinan di Provinsi Bali 2010-2019

Tahun	Kemiskinan (Jiwa)
2010	174.930
2011	166.230
2012	160.950
2013	186.530
2014	195.950
2015	218.790
2016	174.940
2017	176.480
2018	168.340
2019	156.910

Sumber: BPS Provinsi Bali

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa kemiskinan di Bali mengalami penurunan dan kenaikan setiap tahunnya. Jumlah kemiskinan di Bali yang tertinggi terjadi pada tahun 2015 di provinsi Bali dengan jumlah 218.790 ribu jiwa. Penurunan terjadi pada tahun 2019 dengan jumlah 156.910 ribu Jiwa. Tabel di atas membuktikan bahwa setiap tahun terjadi penurunan kemiskinan di Provinsi Bali. Tetapi, sempat terjadi peningkatan dari tahun 2014 dengan jumlah 195.950 menjadi 218.790 ribu jiwa pada tahun 2015.

Salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah kemiskinan di Bali adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi Bali. Abdul Halim (dalam (Iswara & Indrajaya, 2014) menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain. Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan publik yang paling mendasar berupa, pendidikan, kesehatan, perawatan medis, dan lain-lain. Kualitas pengelolaan keuangan akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di dalam wilayah tersebut. Berikut tabel yang menunjukkan Pendapatan Asli Daerah di Bali dalam kurun waktu antara 2010-2019.

Tabel 1. 3
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Bali

Sumber:	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	
Badan Pusat Statistik	2010	Rp	1.393.730.257.000
	2011	Rp	1.723.807.096.000
	2012	Rp	2.042.091.096.000
	2013	Rp	2.529.976.147.000
	2014	Rp	2.920.416.697.000
	2015	Rp	3.041.266.607.000
	2016	Rp	3.041.195.258.000
	2017	Rp	3.398.472.278.000
	2018	Rp	3.718.499.635.000
	2019	Rp	4.023.156.316.000

Tabel 1.3 menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di Bali. PAD tertinggi dalam rentan 10 tahun terjadi pada tahun 2019 dengan jumlah 4.023.156.316.000,00. Sementara jumlah terendah terjadi pada tahun 2010 dengan jumlah 1.393.730.257.000,00. Pendapatan asli daerah menjadi salah satu ukuran yang dapat digunakan sebagai ukuran untuk melihat kemiskinan di suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah yang tinggi apabila digunakan sepenuhnya untuk kepentingan publik, maka masyarakat di daerah tersebut dapat dikatakan.

Angka kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah satu diantaranya adalah Upah Minimum Kabupaten (UMK). Upah Minimum Kabupaten (UMK) adalah upah yang menjadi hak oleh seseorang dalam kabupaten tersebut. Setiap wilayah mempunyai UMK yang berbeda (Niswati, 2014). Pemerintah daerah menetapkan upah minimum dalam suatu daerah dengan harapan angka kemiskinan menjadi rendah. Upah minimum diharap dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap upah rata-rata yang diterima oleh buruh dalam wilayah tersebut. Jika upah minimum di dalam suatu daerah tinggi diharap hal tersebut dapat memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat yang bekerja di wilayah tersebut. Angka upah minimum tersebut terus disesuaikan setiap tahun agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mendasar mereka, dan hidup layak. Berikut upah minimum yang diberlakukan di Provinsi Bali dalam rentan waktu antara 2010-2019

Tabel 1. 4
Jumlah Upah Minimum Provinsi

Tahun	UMK (Rupiah)	
2010	Rp	829.316,00
2011	Rp	890.000,00
2012	Rp	967.500,00
2013	Rp	1.181.000,00
2014	Rp	1.542.600,00
2015	Rp	1.621.172,00
2016	Rp	1.807.600,00
2017	Rp	1.956.727,00
2018	Rp	2.127.157,00
2019	Rp	2.297.969,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Dari tabel 1.4 menunjukkan bahwa dalam rentan waktu 10 tahun, di antaranya pada tahun 2010 sampai 2019 upah minimum mengalami kenaikan yang signifikan. Secara keseluruhan upah minimum di provinsi Bali mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 upah minimum Bali ada pada angka 829.316 ribu rupiah, tahun 2011 jumlahnya adalah 890.000 ribu rupiah, tahun 2012 jumlahnya 967.500, tahun 2013 jumlahnya 1.181.000 rupiah, tahun 2014 jumlahnya 1.542.600 rupiah, tahun 2015 jumlahnya 1.621.172 rupiah, tahun 2016 jumlahnya 1.807.600 rupiah, tahun 2017 jumlahnya 1.956.727 rupiah, tahun 2018 jumlahnya 2.127.157 rupiah, dan tahun 2019 jumlahnya 2.297.969 rupiah (BPS Provinsi Bali, 2020).

Variable lain dalam melihat kemiskinan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia adalah suatu terobosan dalam menilai pembangunan manusia. IPM dapat dijadikan tolak ukur pembangunan suatu wilayah tersebut. IPM berkorelasi negative dengan kondisi kemiskinan di dalam suatu wilayah. Apabila IPM di dalam suatu wilayah tinggi, seharusnya tingkat jumlah kemiskinan di dalam wilayah tersebut menjadi rendah. IPM dihitung berdasarkan data yang menggambarkan empat komponen diantaranya adalah, angka harapan hidup yang mengukur keberhasilan di bidang kesehatan, angka melek huruf dan jumlah rata-rata waktu bersekolah yang mengukur keberhasilan di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok yang dapat dilihat dari rata-rata

besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mengukur keberhasilan di bidang pembangunan hidup yang layak.

Tabel 1. 5
Indeks Pembangunan Manusia di Bali

Tahun	IPM (Indeks)
2010	70,10
2011	71,00
2012	71,62
2013	72,09
2014	72,48
2015	73,27
2016	73,65
2017	74,30
2018	74,77
2019	75,38

Sumber: Badan Pusat Statistik Bali

Data tabel 1.5 menunjukkan bahwa dalam rentan waktu 10 tahun yaitu dari tahun 2010 sampai 2019 menunjukkan adanya kenaikan angka yang signifikan. Menurut data Badan Pusat Statistik Bali yang diterbitkan melalui Berita Resmi Statistik pada tahun 2020 menunjukkan adanya peningkatan IPM di Bali. Tercatat bahwa IPM di bali pada tahun 2019 tercatat 75,38. Angka yang lebih tinggi dari tahun 2018 yaitu 74,77 (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020).

Investasi menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Bali. Salah satu bentuknya ada dalam bentuk investasi fisik. Investasi fisik merupakan salah satu komponen penting dari permintaan agregat yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Peningkatan investasi di sebuah wilayah diharap dapat mengurangi tingkat kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja (Farid, Hailuddin, & Wahyunadi, 2020). Tidak terkecuali dengan wilayah seperti di Bali. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun, berikut data tabel investasi yang ada di Bali.

Tabel 1. 6
Investasi Di Bali

Tahun	Investasi (Rupiah)
2010	30.176.219.960.000
2011	34.307.534.430.000

Sumber: Pusat Provinsi Bali Tabel menunjukkan yang ada di	2012	37.790.559.410.000	Badan Statistik 1.6 investasi Bali
	2013	39.017.453.580.000	
	2014	39.592.269.500.000	
	2015	41.573.633.500.000	
	2016	45.255.299.800.000	
	2017	46.862.545.820.000	
	2018	51.083.639.650.000	
	2019	53.094.894.640.000	

dalam rentan waktu 10 tahun yaitu pada tahun 2010 hingga 2019. Pada tahun 2010 yang menunjukkan angka 30.176.219.960.000,00 rupiah. Pada tahun 2019 jumlah investasi di Bali meningkat menjadi 53.094.894.640.000,00 rupiah. Dari data di atas menunjukkan bahwa investor tertarik untuk melakukan investasi di Bali. Namun investasi yang masuk di Bali mendapat dua kendala, yang mengakibatkan tingkat kemiskinan di Bali masih tinggi. Faktor pertama adalah, investasi yang masuk di Bali merupakan investasi yang dialokasikan bukan pada kebutuhan mendasar seperti akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Investor di Bali lebih suka menanamkan investasinya di bidang pariwisata, seperti hotel, restoran, dan infrastruktur-infrastruktur yang menunjang pariwisata. Kendala kedua adalah tidak meratanya investasi di seluruh provinsi di Bali. Dari sembilan kabupaten/kota yang ada di Bali hanya kabupaten kota seperti Denpasar, Badung, tabanan, dan Gianyar adalah wilayah yang menjadi favorit investor. Akibatnya masih terjadi kesenjangan sosial di Bali (Kompas.com, 2013).

Kemiskinan merupakan persoalan yang ada di seluruh dunia. Baik di negara maju atau di negara berkembang seperti Indonesia. Tidak ada negara yang benar-benar terlepas dari kemiskinan. Yang membedakan antara negara maju dan negara berkembang adalah bagaimana tingkat kemiskinan di negara tersebut, dan bagaimana negara tersebut mengatasi kemiskinan. Setidaknya bagaimana negara tersebut dapat mengurangi jumlah kemiskinan pada masyarakatnya. Tidak terkecuali wilayah seperti Bali yang mengandalkan sektor ekonominya di bidang pariwisata. Bali tumbuh dari sektor pariwisata dan sangat dikenal di dunia internasional, pada praktiknya Bali masih mempunyai jumlah kemiskinan yang cukup tinggi. Padahal dari tabel yang telah disajikan peneliti di atas menunjukkan bahwa dalam rentan waktu sepuluh tahun yaitu pada tahun 2010 sampai dengan 2019, pendapatan daerah di Bali, Upah minimum kabupaten/kota, indeks pembangunan manusia, hingga investasi yang masuk di Bali

mengalami peningkatan di setiap tahun. Namun, pada praktiknya jumlah kemiskinan di Bali juga tinggi meskipun pada beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Tabel menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan ekonomi yang menyebabkan beberapa wilayah di Bali dari 9 provinsi tersebut mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang berbeda.

Jumlah Pendapatan Asli Daerah, Upah Minimum Kabupaten/kota mengalami kenaikan, Indeks pembangunan manusia, dan investasi di Bali mulai tahun 2010 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan. Tetapi di dalam praktiknya kemiskinan di Bali masih dalam jumlah yang tinggi. Berdasarkan variabel bebas terdapat beberapa ketimpangan pada sembilan kabupaten di Bali. kesenjangan tersebut muncul lantaran perbedaan kebutuhan yang diperlukan oleh setiap daerah. Dari berbagai variabel tersebut, penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Bali.

Dari pemaparan persoalan di atas dan perbedaan hasil penelitian, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN INVESTASI TERHADAP KEMISKINAN (STUDI PADA PROVINSI BALI TAHUN 2010-2019)”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kemiskinan di provinsi Bali?
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum kabupaten/kota terhadap kemiskinan di provinsi Bali?
3. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Bali?
4. Bagaimana pengaruh Investasi terhadap kemiskinan di Provinsi Bali?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakan dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemiskinan di Provinsi Bali
2. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap kemiskinan di Provinsi Bali
3. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Provinsi Bali
4. Untuk mengetahui pengaruh Investasi terhadap kemiskinan di Provinsi Bali

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini diharap bermanfaat bagi pihak dan instansi yang terkait sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dan perusahaan dalam hal menentukan kebijakan dan menambah wawasan dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi di provinsi Bali.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai bahan perbandingan dan referensi kedepannya, bagi peneliti yang tertarik untuk membahas masalah pengaruh PAD, UMK, IPM, dan investasi terhadap kemiskinan.

Bagi pemerintah daerah Provinsi Bali penelitian ini diharap menjadi bahan rujukan dan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan guna mengurangi jumlah k